



Volume 1, No 2, Januari (2024)	DOI: https://doi.org/10.59585/jimad	Page: 67–71
-----------------------------------	---	----------------

Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2014 – 2018 (Studi Kasus Di Pemda Kabupaten Jombang)

Hevi Susanti¹, Arief Budiono², Supriadi³

^{1,2,3} Universitas Darul Ulum

Corresponding Author: Hevi Susanti; Email: ariefbudionoemail@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Ratio Analysis, Finance, Government Performance

Received : 5-12-2023

Revised : 03-01-2024

Accepted : 04-01-2024

ABSTRACT

Financial performance analysis in this study is an assessment process regarding the level of progress in achieving the implementation of work/activities of the Regional Government in the financial sector by using tools in the form of financial ratios which consist of: Analysis of Regional Financial Independence Ratio, Analysis of Regional Financial Dependency Ratio, Analysis of Effectiveness of Original Income Ratio Regions, Regional Financial Efficiency Ratio Analysis, Activity Ratio Analysis, Growth Ratio Analysis and Proportion Analysis.

The purpose of writing this final project is to determine the financial performance of the Government of Jombang Regency in the 2014-2018 Fiscal Year.

The data used are primary and secondary data obtained through interviews, observation and literature study. The data obtained were analyzed using quantitative descriptive analysis methods.

After analyzing, it can be concluded that the financial performance of the Jombang Regency Government shows the average regional financial performance which is still unstable. Where the results of calculations every year are still experiencing numbers up and down. This is because the Government of Jombang Regency has not been optimal in managing the wealth of available regional resources. However, on the side of revenue achievement, Jombang Regency has demonstrated its ability to achieve Regional Original Revenue beyond the set targets.

PENDAHULUAN

Perkembangan kondisi didalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat



menginginkan keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi) menjadi dasar diselenggarakannya otonomi daerah di Indonesia. Selain itu dengan maraknya era globalisasi juga menuntut daya saing tiap negara juga daya saing Pemerintah Daerahnya (Halim, 2012: 1). Selanjutnya peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah. Tujuan program otonomi daerah menurut Bastian (2006: 338) adalah “untuk menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis, menciptakan sistem yang lebih menjamin pemerataan dan keadilan, memungkinkan setiap daerah menggali potensi natural dan cultural yang dimiliki, dan kesiapan menghadapi tantangan globalisasi, serta yang sangat penting adalah terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, pemerintah ingin melaksanakan pasal 18 UUD 1945, yaitu dengan melaksanakan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab”. Umumnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan sumber daya manusia (aparatur maupun masyarakat), sumber daya alam, kemampuan keuangan (financial), kemampuan manajemen, kondisi sosial budaya masyarakat, dan karakteristik ekologis.

Pelaksanaan otonomi daerah identik dengan adanya tuntutan Good Governance dalam rangka efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam kerangka otonomi memerlukan prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih. Menurut Mardiasmo (2009: 20) “untuk mewujudkan good governance diperlukan reformasi kelembagaan, reformasi manajemen publik dan reformasi sistem pengelolaan keuangan daerah. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan uang rakyat (public money) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik”. Satu upaya nyata didalam penerapan prinsip-prinsip dasar Good Governance ini adalah penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban keuangan pemerintahan daerah dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Karena sebagian besar otonomi daerah (tugas dan kewenangan mengatur daerah sendiri) diberikan kepada daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota atas dasar pertimbangan budaya, politik (demokrasi), dan ekonomi local.

Sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi,



pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Salah satu pemberian hak otonomi kepada pemerintah daerah adalah untuk menentukan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu pemicu pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi membuka jalan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan.

METODE

Ditinjau dari permasalahan yang diteliti yaitu analisis kinerja keuangan selama 5 (lima) tahun, maka penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka-angka. Pada penelitian kuantitatif lebih menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka (Arikunto, 2002: 344).

Dalam penelitian deskriptif, peneliti bisa membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir: 2005).

Lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Jombang tepatnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 43 Jombang. Sedangkan untuk waktu yang dibutuhkan adalah enam bulan dimulai pada bulan September 2019 hingga Januari 2020.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang sudah diolah sehingga menjadi lebih informatif dan langsung dapat dipergunakan. Data sekunder ini adalah data time series yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jombang tahun anggaran 2014 - 2018 serta data pendukung lainnya yang bersumber Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

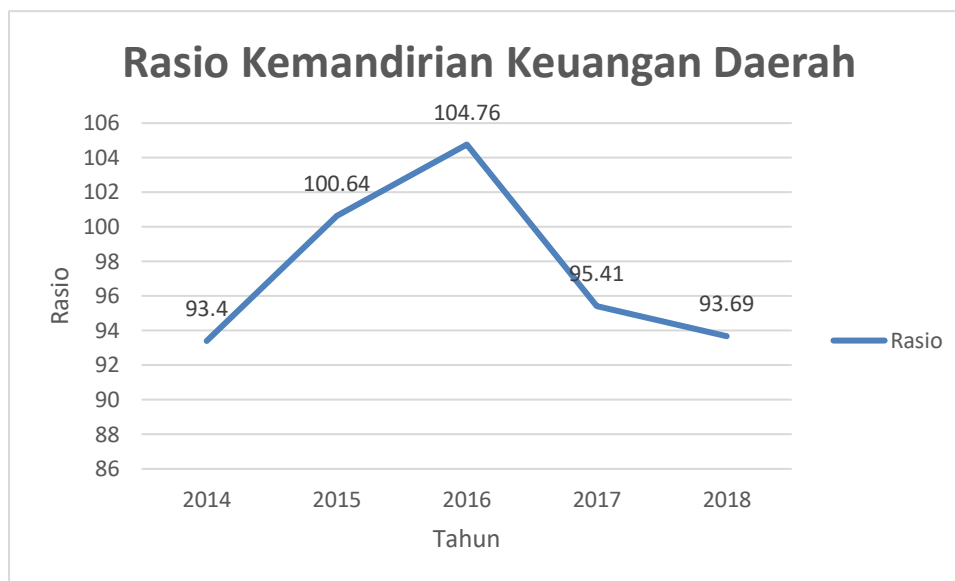
Analisis rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Jombang tahun anggaran 2014 – 2018 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jombang
Tahun Anggaran 2014 – 2018

No	Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio (dalam %)
1	2014	304.065.301.093,38	1.905.860.371.275,38	15,95
2	2015	363.963.252.971,96	2.151.287.874.052,96	16,92
3	2016	374.141.185.825,47	2.257.099.357.781,47	16,58
4	2017	521.236.583.750,17	2.517.003.141.056,17	20,71
5	2018	438.197.175.438,60	2.512.786.629.845,60	17,44

Sumber : BPKAD Kabupaten Jombang

Dari data Tabel 1 dapat dibuat grafik rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Jombang dari tahun anggaran 2014 sampai tahun anggaran 2018 seperti ditunjukkan pada Gambar 1 berikut ini,



Gambar 1
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jombang
Tahun Anggaran 2014 – 2018

Berdasarkan data diatas dapat dilihat hasil perhitungan rasio kemandirian daerah yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dimulai dari tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2018 persentase perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah cukup stabil karena mengalami naik turun sedikit terhadap hasil perhitungan persentasenya.

Diawali dari tahun anggaran 2014 dimana prosentasenya adalah 15,95% yang kemudian mengalami kenaikan pada tahun anggaran 2015 menjadi 16,92%. Kenaikan ini terjadi karena pada tahun 2015 jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan jumlah total pendapatan daerah juga meningkat, sehingga rasio kemandirian keuangan daerah menjadi naik. Hal ini menggambarkan bahwa pada tahun 2015, pendapatan daerah Kabupaten Jombang banyak diperoleh dari pendapatan selain Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun anggaran 2016 naik menjadi 16,58% dan pada tahun anggaran 2017 kembali naik menjadi 20,71%. Dan pada tahun 2018 turun menjadi 17,44%, penurunan rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2018 disebabkan karena



tingginya pendapatan daerah terutama dari pendapatan transfer yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Jombang.

Berdasarkan analisis kemandirian bahwa semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah dan begitupula sebaliknya. Berdasarkan analisis tersebut, dapat digambarkan bahwa dimulai dari tahun anggaran 2014 sampai 2018, tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Jombang masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan persentase yang masih rendah dalam setiap tahunnya.

2. Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah menggunakan dana-dana yang diberikan pemerintah.

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2 berikut ini menyajikan rasio ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Jombang tahun anggaran 2014 – 2018.

Tabel 2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Jombang
Tahun Anggaran 2014 – 2018

No	Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio (dalam %)
1	2014	1.131.290.917.695,00	1.905.860.371.275,38	59,36
2	2015	1.170.782.676.685,00	2.151.287.874.052,96	54,42
3	2016	1.479.480.105.860,00	2.257.099.357.781,47	65,55
4	2017	1.486.041.199.349,00	2.517.003.141.056,17	59,04
5	2018	1.559.258.761.514,00	2.512.786.629.845,60	62,05

Sumber : BPKAD Kabupaten Jombang



Dari Tabel 2 dapat dibuat grafik rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Jombang dari tahun anggaran 2014 sampai tahun anggaran 2018 seperti ditunjukkan pada Gambar 2 berikut ini,



Gambar 2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2014 – 2018

Dari data diatas dapat dilihat rasio ketergantungan keuangan daerah pada tahun 2014 sebesar 59,36% dan tahun 2015 sebesar 52,42%. Sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 65,55% dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 59,04%. Untuk tahun 2018 kembali mengalami kenaikan sebesar 62,05%.

Berdasarkan analisis ketergantungan bahwa semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin buruk pemerintah daerah karena tidak adanya dana dari penghasilan daerah sendiri yang seharusnya dapat membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Maka dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatannya masih sangat bergantung terhadap pemerintah pusat/propinsi. Namun pada tahun 2017 rasio ketergantungan keuangan daerah mulai menurun menjadi 59,04% karena meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Tetapi pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan sebesar 62,05%, hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat.



Berdasarkan hasil perhitungan rasio diatas dapat diketahui bahwa keuangan daerah pemerintah Kabupaten Jombang masih sangat tergantung pada pemerintah pusat dan/atau pemerintah propinsi.

3. Analisis Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah ini menunjukkan seberapa efektif suatu daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang telah dianggarkan tersebut.

$$\text{Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Total Target Penerimaan PAD}} \times 100$$

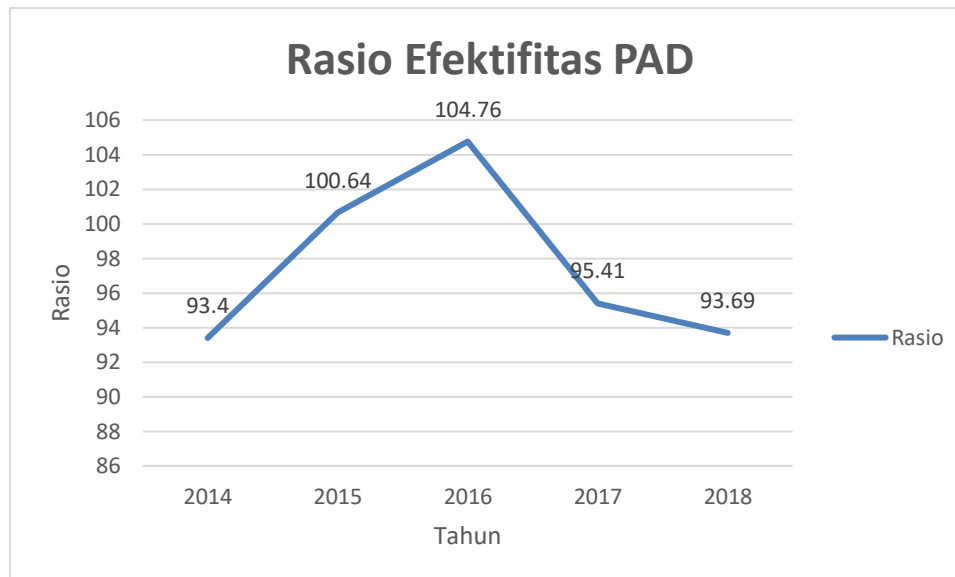
Tabel 3 berikut ini menyajikan rasio efektifitas PAD Pemerintah Kabupaten Jombang tahun anggaran 2014 – 2018.

Tabel 3 Rasio Efektifitas PAD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2014 – 2018

No	Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio (dalam %)
1	2014	304.065.301.093,38	254.380.721.849,67	119,53
2	2015	363.963.252.971,96	316.493.427.356,20	115,00
3	2016	374.141.185.825,47	345.234.275.643,67	108,37
4	2017	521.236.583.750,17	496.029.660.251,68	105,08
5	2018	438.197.175.438,60	427.379.057.690,85	102,53

Sumber : BPKAD Kabupaten Jombang

Dari Tabel 3 dapat dibuat grafik rasio efektifitas PAD Kabupaten Jombang dari tahun anggaran 2014 sampai tahun anggaran 2018 seperti ditunjukkan pada Gambar 3 berikut ini,



Gambar 3 Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2014 – 2018

Melalui hasil perhitungan dari tabel dan grafik diatas dapat digambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (efektifitas).

Kategori penilaian tingkat efektifitas kinerja keuangan yaitu dimana kriteria sangat efektif dengan rasio diatas 100%, kriteria efektif dengan rasio 90%-100%, kriteria cukup efektif dengan rasio 80%-90%, kriteria kurang efektif dengan rasio 60%-80% dan kriteria tidak efektif dengan rasio dibawah 60%.

Jika diperbandingkan dari tahun ke tahun, rasio efektifitas PAD Kabupaten Jombang pada tahun 2014 sebesar 119,53% yang merupakan rasio tertinggi selama 5 tahun terakhir dan mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 115% dan terus menurun pada tahun 2016, 2017 dan 2018 walaupun tidak terlalu signifikan. Penurunan rasio ini bukan berarti turunnya jumlah PAD yang terealisasi, justru jumlah PAD yang terealisasi lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya namun hal ini disebabkan terlalu tingginya penetapan target PAD oleh Pemerintah Kabupaten Jombang sehingga tidak menunjukkan perbedaan antara target dan realisasi yang signifikan. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 102,53%, hal ini dikarenakan menurunnya realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Jombang.



Sesuai dengan Tabel 3 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan, maka tingkat efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Jombang untuk tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sangat efektif, karena berada pada interval diatas 100%. Hal ini menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Jombang yang baik dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

4. Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ini menunjukkan seberapa efisien suatu daerah dalam melaksanakan kegiatan atau proyek dengan melakukan perbandingan antara output/pengeluaran dengan input/masukkan.

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100$$

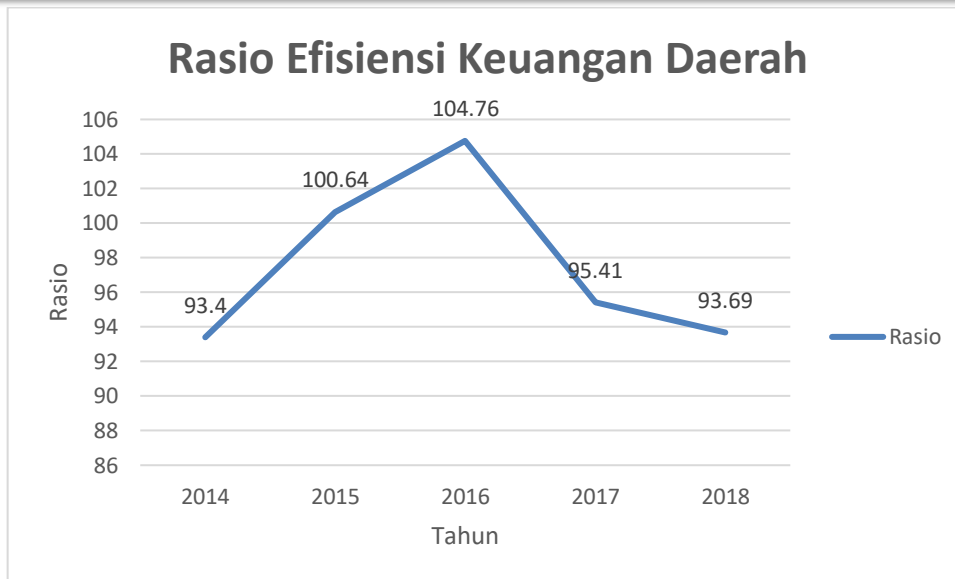
Tabel 4 berikut ini menyajikan rasio efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Jombang tahun anggaran 2014 – 2018.

Tabel 4
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2014-2018

No	Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio (dalam %)
1	2	3	4	5 = (3 : 4)
1	2014	1.780.114.993.045,15	1.905.860.371.275,38	93,40
2	2015	2.164.953.026.633,20	2.151.287.874.052,96	100,64
3	2016	2.364.581.573.271,18	2.257.099.357.781,47	104,76
4	2017	2.401.430.893.002,94	2.517.003.141.056,17	95,41
5	2018	2.354.108.953.698,38	2.512.786.629.845,60	93,69

Sumber : BPKAD Kabupaten Jombang

Dari Tabel 4 diatas dapat dibuat grafik rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Jombang dari tahun anggaran 2014 sampai tahun anggaran 2018 seperti ditunjukkan pada *Gambar 4* berikut ini,



Gambar 4 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2014 – 2018

Dari perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir Kabupaten Jombang mampu merealisasikan pendapatan daerah diatas realisasi belanja daerah kecuali pada tahun 2015 dan 2016.

Kategori penilaian tingkat efisiensi kinerja keuangan yaitu dimana kriteria sangat efisien dengan rasio dibawah 60%, kriteria efisien dengan rasio 60%-80%, kriteria cukup efisien dengan rasio 80%-90%, kriteria kurang efisien dengan rasio 90%-100% dan kriteria tidak efisien dengan rasio 100% ke atas. Sesuai dengan tabel 7 rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2015 – 2016 tergolong kriteria tidak efisien karena berada diatas 100%. Sedangkan pada tahun 2014, 2017 dan 2018 tergolong kriteria kurang efisien karena berada pada interval 90% - 100%. Hal ini dikarenakan selisih antara realisasi pendapatan daerah dengan realisasi belanja daerah tidak signifikan.

5. Analisis Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (Belanja Tidak Langsung/BTL) dan belanja pembangunan (Belanja Langsung/BL) secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang



digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja APBD}} \times 100$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja APBD}} \times 100$$

Tabel 5 berikut ini menyajikan rasio belanja rutin terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Jombang tahun anggaran 2014 – 2018.

Tabel 5
Rasio Belanja Rutin Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2014 – 2018

No	Tahun	Total Belanja Rutin	Total Belanja Daerah	Rasio (dalam %)
1	2	3	4	5 = (3 : 4)
1	2014	1.010.946.833.803,00	1.780.114.993.045,15	56,79
2	2015	1.250.258.205.803,00	2.164.953.026.633,20	57,75
3	2016	1.469.294.238.230,00	2.364.581.573.271,18	62,14
4	2017	1.392.084.543.900,59	2.401.430.893.002,94	57,97
5	2018	1.418.316.856.374,00	2.354.108.953.698,38	60,25

Sumber : BPKAD Kabupaten Jombang

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa prosentase rasio belanja rutin dari tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu 62,14% di tahun 2017 kemudian turun menjadi 57,97%. Hal ini disebabkan karena terjadi pensiun Pegawai Negeri Sipil yang cukup banyak sehingga mempengaruhi penyerapan belanja tidak langsung. Sedangkan di tahun 2018 mengalami kenaikan kembali menjadi 60,25% dikarenakan ada kenaikan gaji PNS dan tambahan gaji untuk perekrutan CPNS yang baru.

Tabel 6 berikut ini menyajikan rasio belanja pembangunan terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Jombang tahun anggaran 2014 – 2018.



Tabel 6

Rasio Belanja Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2014 – 2018

No	Tahun	Total Belanja Pembangunan	Total Belanja Daerah	Rasio (dalam %)
1	2	3	4	5 = (3 : 4)
1	2014	769.168.159.242,15	1.780.114.993.045,15	43,21
2	2015	914.694.820.830,20	2.164.953.026.633,20	42,25
3	2016	895.287.335.041,18	2.364.581.573.271,18	37,86
4	2017	1.009.346.349.102,35	2.401.430.893.002,94	42,03
5	2018	935.792.097.324,38	2.354.108.953.698,38	39,75

Sumber : BPKAD Kabupaten Jombang

Dari Tabel 6 rasio belanja pembangunan dari tahun 2014 sampai tahun 2016 terus mengalami penurunan yaitu 37,86%. Pada tahun 2017 rasio belanja pembangunan mengalami kenaikan menjadi 42,03% dan pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 39,75%.

Berdasarkan perhitungan diatas sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin sehingga rasio belanja pembangunan terhadap APBD relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rasio belanja rutin yang selalu lebih besar dari rasio belanja pembangunan dan tingkat pertumbuhan belanja rutin jauh lebih besar dari pada tingkat pertumbuhan belanja pembangunan. Besarnya alokasi dana untuk belanja rutin terutama dikarenakan besarnya belanja pegawai untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan pemerintah Kabupaten Jombang yang lebih condong pada ekonomi kerakyatan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja pembangunan, sehingga pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja rutin yang mengakibatkan belanja pembangunan untuk pemerintah Kabupaten Jombang kecil atau belum terpenuhi. Seharusnya pemerintah daerah lebih memperhatikan sektor pembangunan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Hal ini sedang diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Jombang dalam meningkatkan belanja pembangunan dengan menekan jumlah belanja rutin khususnya



belanja pegawai pada tiap tahunnya. Hal ini mulai dilaksanakan pada tahun 2011 dengan tidak mengadakan rekrutmen CPNS sehingga tidak ada penambahan jumlah belanja rutin yang harus dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Jombang.

6. Analisis Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya.

Analisis rasio pertumbuhan dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan APBD, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi pengeluarannya atau belanja daerah. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

1) Analisis Pertumbuhan terhadap Pendapatan Daerah

Analisis ini menitik beratkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh atas PAD yaitu ketentuan yang berupa peraturan daerah (dengan berpedoman pada UU dan PP), penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta sistem pemungutannya.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang dapat digunakan sebagai umpan balik (*feedback*) bagi Pemerintah Kabupaten Jombang, sehingga dapat meningkatkan PAD.

Pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Jombang tahun anggaran 2014 – 2018 disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7
Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2014-2018

No	Tahun	Realisasi PAD	Rasio (dalam %)
1	2014	304.065.301.093,38	-
2	2015	363.963.252.971,96	19,70
3	2016	374.141.185.825,47	2,80



4	2017	521.236.583.750,17	39,32
5	2018	438.197.175.438,60	(15,93)
Rata – Rata Rasio Pertumbuhan PAD			9,18

Sumber : BPKAD Kabupaten Jombang

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Jombang untuk tahun 2015 terhadap tahun sebelumnya menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 19,70%. Hal ini dikarenakan naiknya penerimaan dari sisi non pajak terutama dari penerimaan retribusi daerah. Pada tahun 2016 pertumbuhan PAD Kabupaten Jombang dapat dikatakan menurun tajam sebesar 2,80% dan pada tahun 2017 masih tumbuh secara positif yang tinggi sebesar 39,32%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar -15,93%, hal ini dikarenakan menurunnya PAD dari pajak daerah serta dari lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2) Analisis Pertumbuhan terhadap Belanja Daerah

Analisis pertumbuhan terhadap belanja daerah bertujuan untuk melihat perkembangan belanja daerah, baik belanja rutin/belanja tidak langsung maupun belanja pembangunan/belanja langsung dalam perhitungan APBD selama periode yang dianalisis.

a. Pertumbuhan Belanja Rutin/Belanja Tidak Langsung

Pertumbuhan belanja rutin/belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten Jombang tahun anggaran 2014 – 2018 disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8
Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2014-2018

No	Tahun	Realisasi Belanja Rutin	Rasio (dalam %)
1	2014	1.010.946.833.803,00	-
2	2015	1.250.258.205.803,00	23,67
3	2016	1.469.294.238.230,00	17,52
4	2017	1.392.084.543.900,59	(5,25)



5	2018	1.418.316.856.374,00	1,88
Rata – Rata Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin			7,56

Sumber : BPKAD Kabupaten Jombang

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan belanja rutin untuk tahun 2015 sebesar 23,67%, tahun 2016 sebesar 17,52%, untuk tahun 2017 sebesar -5,25% dan tahun 2018 sebesar 1,88%. Rasio pertumbuhan belanja aparatur daerah yang terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar -5,25%, hal ini disebabkan pada tahun tersebut terjadi pengurangan pegawai yang cukup banyak dikarenakan batas usia pensiun pegawai sehingga anggaran untuk belanja aparatur menurun dengan signifikan.

b. Pertumbuhan belanja pembangunan/belanja langsung

Pertumbuhan belanja pembangunan/ belanja langsung Pemerintah Kabupaten Jombang tahun anggaran 2014-2018 disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9

Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2014 – 2018

No	Tahun	Realisasi Belanja Pembangunan	Rasio (dalam %)
1	2014	769.168.159.242,15	-
2	2015	914.694.820.830,20	18,92
3	2016	895.287.335.041,18	(2,12)
4	2017	1.009.346.349.102,35	12,74
5	2018	935.792.097.324,38	(7,29)
Rata – Rata Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan			4,45

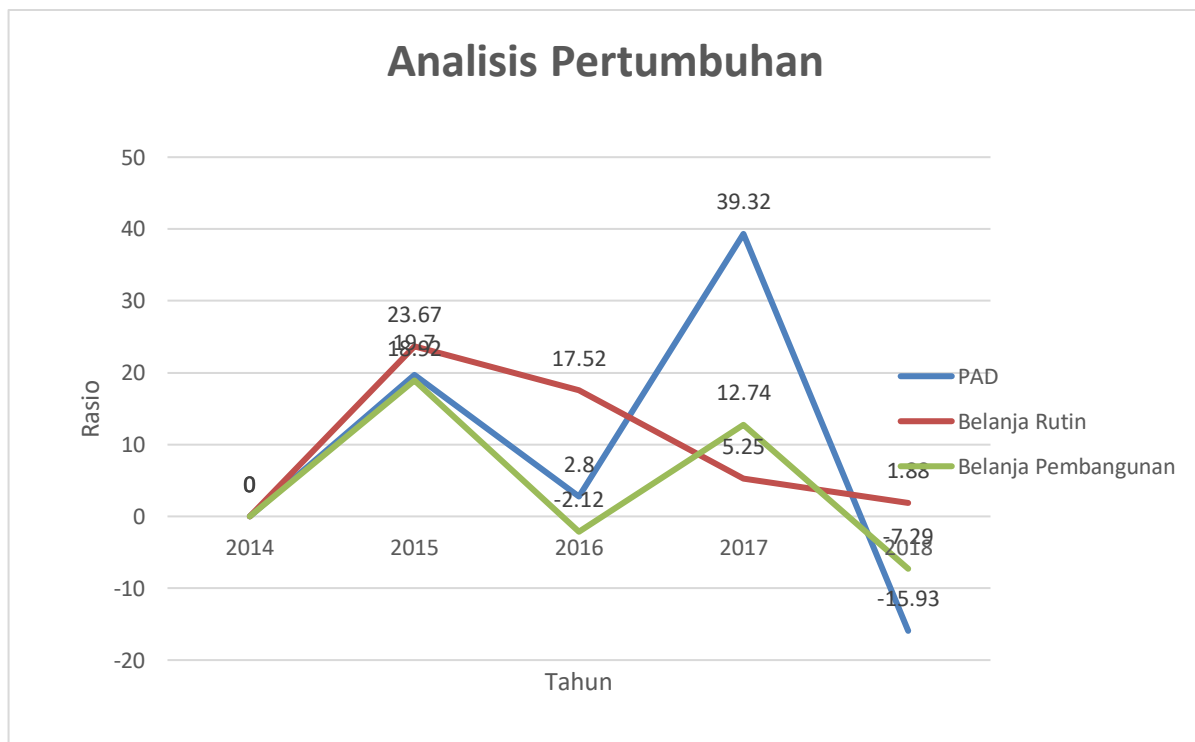
Sumber : BPKAD Kabupaten Jombang

Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan belanja pembangunan untuk tahun 2015 sebesar 18,92%, sedangkan untuk tahun 2016 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,12%, untuk tahun 2017 mengalami pertumbuhan positif sebesar 12,74% dan untuk tahun 2018 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -7,29%. Rasio pertumbuhan



belanja pembangunan mengalami *trend negatif* pada tahun 2016 dan tahun 2018, hal ini terjadi karena terjadi penurunan pada belanja modal terutama pada belanja jaringan, jalan dan irigasi. Dan mengalami trend positif pada tahun 2015 dan 2017 karena terjadi kenaikan belanja modal terutama pada belanja pengadaan tanah, konstruksi bangunan dan fasilitas penunjang jalan.

Secara keseluruhan analisis pertumbuhan Kabupaten Jombang dapat digambarkan dengan grafik pada Gambar 5 berikut ini,



Gambar 5 Rasio Pertumbuhan Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2014 – 2018

Berdasarkan hasil perhitungan dan gambar di atas, pertumbuhan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Jombang masih belum stabil karena selama kurun waktu 5 tahun terjadi turun naik antara PAD, belanja rutin dan belanja pembangunan. Dimana pada tahun 2015 rasio pertumbuhan PAD berada dibawah rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan. Sedangkan pada tahun 2016 rasio pertumbuhan PAD berada diatas rasio belanja pembangunan tetapi rasio belanja pembangunan terpuruk berada dibawah belanja rutin. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 rasio pertumbuhan PAD dan rasio belanja pembangunan berada diatas rasio belanja rutin. Pertumbuhan suatu daerah dapat dikatakan baik apabila pemerintah daerah dapat mengefisienkan biaya yang



dikeluarkan untuk belanja rutin dan lebih mengefektifkan penggunaan pendapatan yang diperoleh daerah untuk sektor pembangunan yang dapat mendukung peningkatan penerimaan PAD.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil analisis data, dapat digambarkan bahwa kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Jombang menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil. Dimana hasil perhitungan disetiap tahun masih mengalami angka yang naik turun. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Jombang belum optimal didalam pengelolaan kekayaan sumber daya daerah yang tersedia. Namun, disisi pencapaian pendapatan, Kabupaten Jombang telah menunjukkan kemampuan dalam mencapai Pendapatan Asli Daerah melampaui target yang ditetapkan.
2. Pada rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Jombang dari hasil analisis tersebut dapat digambarkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Jombang masih kurang stabil. Hal ini karena masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang.
3. Untuk rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Jombang dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa tingkat ketergantungan keuangan pemerintah Kabupaten Jombang terhadap bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi masih sangat tinggi. Hal ini karena dalam melaksanakan kegiatannya Pemerintah Kabupaten Jombang mendapat dana perimbangan/pendapatan transfer dari pemerintah pusat/propinsi.
4. Berdasarkan hasil perhitungan untuk rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah dari hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang telah direncanakan sudah baik. Dalam hal ini kinerja pemerintah Kabupaten Jombang sangat efektif karena rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah berada diatas 100 persen.
5. Berdasarkan perhitungan rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Jombang dapat diketahui bahwa rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Jombang tidak efisien dan kurang efisien hal ini disebabkan walaupun pemerintah daerah Kabupaten Jombang mampu merealisasikan pendapatan daerah yang lebih tinggi dibandingkan realisasi



belanja daerah, namun selisih antara keduanya tidak signifikan.

6. Didalam pengukuran terhadap rasio aktivitas dapat diketahui bahwa dari analisis tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar dana yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Jombang masih diprioritaskan untuk pemenuhan belanja rutin, sehingga rasio belanja pembangunan masih relatif lebih kecil.
7. Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan didapatkan hasil pertumbuhan PAD Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Jombang masih belum stabil karena selama kurun waktu 5 tahun terjadi turun naik antara Pendapatan Asli Daerah, belanja rutin dan belanja pembangunan.

REFERENSI

- Bachtiar, A. d. (2002). Akuntansi Pemerintahan, Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Saat, I., & Suryadi. (2006). Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar, Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Baswir, R. (2000). Akuntansi Pemerintahan Indonesia, Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Gade, M. (2005). Teori Akuntansi, Edisi Pertama. Jakarta: Almahira.
- Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, S. S. (2002). Teori Akuntansi Laporan Keuangan, Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik, Edisi Keempat. Yogyakarta: Andi Offset.
- Margaretha, F. (2004). Teori dan Aplikasi Manajemen Keuangan. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Munawir. (2002). Analisa Laporan Keuangan, Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberty.
- Muslich, M. (2003). Manajemen Keuangan Modern (Analisis, Perencanaan dan Kebijaksanaan). PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Nur, I., & Susilo, D. E. (2023). Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah berdasarkan PSAK no.107 (Studi Kasus BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang). JIMAD: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(1), 18–29. <https://doi.org/10.59585/jimad.v1i1.93>
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 A Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang.
- Posi, S. H., & Muhammad, I. (2023). Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Sembilan Bahan Pokok Di Kecamatan Tobelo. JIMAD: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(2), 67–71. <https://doi.org/10.59585/jimad.v1i2.189>



- Peraturan Bupati Jombang Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ronaydi, M., & Castrawijaya, C. (2023). Analisis Lingkungan Lembaga Dakwah Dalam Inovasi dan Kewirausahaan Di Era Disruptif. *JIMAD : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 72–81. <https://doi.org/10.59585/jimad.v1i2.206>
- Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.